



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan dan
Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Pertalite (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 56/Pid.Sus/2025/Pn Pbg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Aldi Ramdani

211003742018570

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN DAN PENYALAHGUNAAN BAHAN MINYAK BERSUBSIDI JENIS
PERTALITE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ALDI RAMDANI
NPM : 211003742018570

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI
NUPTK : 0145740641130073

Anggota,

DR. SRI WULANDARI, SH.,MHUM.,MKN
NUPTK : 9562743644230083

Anggota,

SARYANA, SH.MSI
NUPTK :4735743644130122

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EBY LISDIJONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2753741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana	10
B. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	12
C. Teori Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan	16
D. Pengertian dan Bentuk Penimbunan serta Penyalahgunaan BBM Bersubsidi	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Tipe Penelitian	22
B. Spesifikasi Penelitian	22
C. Sumber Data.....	23
D. Metode Pengumpulan Data	24
F. Metode Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	26
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Pbg	26

B. Kesesuaian dan proporsionalitas sanksi pidana dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/PN Pbg dibandingkan ancaman pidana UU Migas	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Pbg terhadap pelaku tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite, serta menilai kesesuaian dan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan dibandingkan ancaman Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun secara sistematis melalui pemetaan fakta persidangan, pembuktian unsur delik, dan penjatuhan pidana. Hakim menilai perbuatan terdakwa berupa pembelian BBM secara berulang, penampungan pada tempat transit, serta penjualan kembali melalui pembagian peran, sehingga memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan serta penyertaan menurut Pasal 55 KUHP. Sanksi pidana berupa penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 secara normatif sesuai dengan struktur ancaman kumulatif Pasal 55 UU Migas dan memenuhi prinsip legalitas. Namun, dari aspek proporsionalitas dan efektivitas efek jera, khususnya pencegahan ekonomi, besaran denda dinilai relatif kecil dibandingkan ancaman maksimum dalam undang-undang, sehingga masih menyisakan ruang evaluasi dalam rangka memperkuat perlindungan kebijakan subsidi energi.

Kata kunci: pertimbangan hakim, BBM bersubsidi, Pertalite, UU Migas, proporsionalitas.

ABSTRACT

This study analyzes the legal reasoning of the judges in the Decision of the Purbalingga District Court Number 56/Pid.Sus/2025/PN Pbg concerning the criminal offense of hoarding and misuse of subsidized fuel (Pertalite), as well as examines the conformity and proportionality of the imposed criminal sanctions in comparison with Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas Law). This research is a normative legal study using statutory and case approaches, analyzed qualitatively based on primary and secondary legal materials. The results show that the judges' reasoning was systematically constructed through the identification of trial facts, examination of the elements of the offense, and the imposition of punishment. The court found that the defendant repeatedly purchased subsidized fuel, stored it in a transit warehouse, and resold it through a structured distribution system involving other individuals, thereby fulfilling the elements of the charged offense and participation under Article 55 of the Criminal Code. The imposed sentence of one year imprisonment and a fine of IDR 1,000,000 formally complies with the cumulative penalty structure under Article 55 of the Oil and Gas Law and upholds the principle of legality. However, from the perspective of proportionality and deterrence particularly economic deterrence the relatively small amount of the fine raises concerns regarding its effectiveness in preventing profit-driven misuse of subsidized fuel and protecting national energy subsidy policies.

Keywords: *judicial reasoning, subsidized fuel, Pertalite, Oil and Gas Law, proportionality.*